

**MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENANGGULANGI  
COVID 19**

**Fitriana Selvia**

Universitas Palangka Raya  
Email: selviaf@fisip.upr.ac.id

---

**Abstrak**

Covid-19 adalah pandemi global yang telah mengubah cara hidup manusia dan mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Penanggulangan Covid-19 menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat, karena memerlukan kerja sama dan koordinasi yang baik di semua tingkatan. Oleh karena itu, model kolaboratif governance muncul sebagai pendekatan yang efektif untuk mengatasi pandemi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi model collaborative governance dalam menanggulangi Covid-19, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan model tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan yang diperoleh dari Google Scholar. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model collaborative governance dapat menjadi solusi dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kebijakan-kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah pandemi. Dalam implementasinya, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam model collaborative governance. Selain itu, diperlukan juga keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Model collaborative governance juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sektor swasta dalam menanggulangi pandemic.

---

**Kata Kunci:** model, kolaborasi, tata kelola pemerintah.

---

**Abstract**

*Covid-19 is a global pandemic that has changed the way people live and affected all aspects of life, including social, economic and political. Overcoming Covid-19 is a big challenge for the government and society, as it requires good cooperation and coordination at all levels. Therefore, the collaborative governance model has emerged as an effective approach to overcome this pandemic. The purpose of this study is to analyze the implementation of the collaborative governance model in tackling Covid-19, as well as what factors influence the success of the model. This research uses a qualitative descriptive method, while the data collection technique is a literature study obtained from Google Scholar. The data that has been collected is then analyzed by content analysis. The results of this study show that the collaborative governance model can be a solution in tackling the Covid-19 pandemic. Through collaboration between the government, the private sector, and the community, policies taken can be more effective in overcoming pandemic problems. In its implementation, good communication and coordination are needed between the stakeholders involved in the collaborative*

*governance model. In addition, community involvement is also needed in the decision-making process and policy implementation. The collaborative governance model can also increase public trust in the government and the private sector in tackling the pandemic.*

---

**Keywords:** *model, collaborative, governance.*

---

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 adalah suatu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, China pada Desember 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan telah menyebar ke seluruh dunia, mempengaruhi kehidupan manusia secara signifikan (Supriatna, 2020). Tak terkecuali bagi Indonesia, yang menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak di Asia Tenggara.

Sejak pertama kali terdeteksi pada awal Maret 2020, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat secara signifikan (Joyosemito & Nasir, 2021). Menurut data dari laman [covid.go.id](https://covid.go.id) per tanggal 21 April 2023, terdapat lebih dari 6,7 juta kasus positif Covid-19 di Indonesia, dengan jumlah kematian mencapai lebih dari 161 ribu jiwa. Selama pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus, antara lain melalui kebijakan pembatasan sosial, penggunaan masker, dan vaksinasi massal (Wahidah, Athallah, Hartono, Rafqie, & Septiadi, 2020). Namun, pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan masih adanya varian baru virus Covid-19 yang lebih menular (Marfu'ah, 2022). Selain upaya tersebut, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi Covid-19 adalah dengan mengadopsi model Collaborative Governance.

Model Collaborative Governance adalah suatu pendekatan untuk mengelola isu-isu kompleks dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan keahlian yang berbeda. Model ini mengedepankan kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lain-lain dalam mengambil keputusan dan melaksanakan program atau kebijakan publik. Model ini bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dan berbagai pihak lainnya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik terkait penanganan Covid-19 (Hardi, 2020).

Namun, implementasi model Collaborative Governance dalam penanganan Covid-19 di Indonesia masih belum maksimal. Beberapa kendala seperti perbedaan pandangan antar pihak, kurangnya koordinasi antar instansi, dan kurangnya dukungan dari masyarakat dapat menghambat keberhasilan implementasi model Collaborative Governance (La Ode Syaiful Islamy, 2018). Oleh karena itu, penelitian tentang model Collaborative Governance dalam menanggulangi Covid-19 di Indonesia sangat relevan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan rekomendasi untuk memperbaiki implementasi model ini.

Selain itu, perlu dilakukan penelitian terkait efektivitas model Collaborative Governance dalam menanggulangi Covid-19 di Indonesia. Dalam situasi pandemi, efektivitas kebijakan publik dalam menanggulangi Covid-19 menjadi sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif yang diakibatkan oleh pandemi ini. Dalam konteks ini, penelitian akan membantu pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian tentang model Collaborative Governance dalam menanggulangi Covid-19 di Indonesia perlu

dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam meningkatkan implementasi model Collaborative Governance dan efektivitas kebijakan dalam menanggulangi Covid-19.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk deskripsi atau uraian yang detail dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti (Rusli, 2021). Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan adalah metode yang menggunakan sumber informasi dari bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen-dokumen lainnya sebagai dasar penelitian (Yusuf, Agustang, Idkhan, & Rifdan, 2021). Dalam hal ini, studi kepustakaan dilakukan dengan mencari informasi tentang topik penelitian yang diinginkan dari sumber-sumber yang terpercaya dan relevan seperti Google Scholar.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis isi. Analisis isi adalah teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasikan pola-pola dalam data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan kemudian diidentifikasi, dikategorikan, dan diinterpretasikan dengan menggunakan analisis isi (Ahmad, 2018). Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi model collaborative governance dalam menanggulangi Covid-19, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya dan strategi yang efektif dalam implementasinya. Dengan menggunakan teknik analisis isi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang model collaborative governance dalam menanggulangi Covid-19, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi pandemi ini

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsep Collaborative Governance atau tata kelola kolaboratif merupakan suatu pendekatan untuk mengelola kebijakan atau masalah yang kompleks dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Collaborative Governance bertujuan untuk menciptakan konsensus dan partisipasi yang aktif dari para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan (La Ode Syaiful Islamy, 2018).

Collaborative Governance didasarkan pada prinsip bahwa pemecahan masalah yang kompleks memerlukan kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Hal ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, organisasi masyarakat sipil, perusahaan, pemerintah, akademisi, dan berbagai pihak lainnya (Hardi, 2020).

Collaborative Governance mengutamakan kerjasama dan kemitraan antarpihak dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Melalui proses kolaboratif ini, para pihak yang terlibat dapat saling belajar dan memahami perspektif masing-masing sehingga dapat menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan (Fanani & Ibrahim, 2018). Dalam Collaborative Governance, proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pemangku kepentingan diberikan akses informasi yang cukup untuk mengambil keputusan yang tepat (Riskiyono, 2015). Model Collaborative Governance telah diterapkan di Indonesia, salah satunya di Jakarta.

Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memperkenalkan program Jakarta Tanggap Covid-19 sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di daerah tersebut. Program ini mengedepankan konsep Collaborative Governance dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam upaya penanggulangan pandemi. Dalam program Jakarta Tanggap Covid-19, pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain perusahaan swasta, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, serta lembaga pemerintahan lainnya. Kolaborasi ini dilakukan dalam berbagai bidang, mulai dari pengadaan alat kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis, hingga penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat. Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan fasilitas rumah sakit swasta untuk menampung pasien Covid-19. Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan 20 rumah sakit swasta dalam pengelolaan fasilitas kesehatan Covid-19. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi untuk mempercepat proses tes dan tracing Covid-19 (Destanti, Uljanatunnisa, & Handayani, 2021).

Kolaborasi juga dilakukan dengan organisasi masyarakat sipil dalam upaya memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protokol kesehatan Covid-19. Pemerintah bekerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam penyampaian informasi, edukasi, dan kampanye gerakan masker bagi masyarakat (Gunawan & Toni, 2022).

Dengan implementasi konsep Collaborative Governance melalui program Jakarta Tanggap Covid-19, Pemerintah DKI Jakarta berhasil menurunkan angka kasus dan kematian akibat Covid-19 (Khasanah & Purwaningsih, 2021). Meskipun demikian, kolaborasi antarpihak yang melibatkan kepentingan yang berbeda dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di DKI Jakarta juga mengalami kendala dan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dalam mengoordinasikan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat agar dapat mencapai tujuan bersama secara efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan model collaborative governance dalam menanggulangi Covid-19 antara lain:

1. Kepemimpinan yang efektif  
Kepemimpinan yang kuat dan efektif sangat penting dalam memastikan kesinambungan dan keberhasilan dari model collaborative governance dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Kepemimpinan yang baik dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga serta mempercepat pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang efektif.
2. Komunikasi yang efektif  
Komunikasi yang terbuka, jelas, dan akurat sangat penting dalam membangun kerja sama dan kolaborasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Komunikasi yang efektif juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga yang terlibat dalam penanganan pandemi.
3. Partisipasi masyarakat  
Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam memastikan keberhasilan model collaborative governance dalam menanggulangi Covid-19. Partisipasi masyarakat dapat memperkuat pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan meningkatkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan penanganan pandemi.
4. Koordinasi dan kolaborasi antarlembaga

Kolaborasi dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antarsektor sangat penting dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Kolaborasi antarlembaga dapat memperkuat pengambilan keputusan yang terkoordinasi dan efektif serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.

5. Penanganan secara holistik

Penanganan pandemi Covid-19 harus dilakukan secara holistik dan menyeluruh. Penanganan pandemi harus melibatkan berbagai sektor, seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan, serta memperhatikan aspek psikologis masyarakat yang terdampak.

6. Pengambilan keputusan berdasarkan bukti

Pengambilan keputusan dalam menanggulangi pandemi Covid-19 harus didasarkan pada bukti dan data yang akurat serta informasi yang terkini. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan yang diambil efektif dan tepat sasaran.

7. Keterlibatan sektor swasta

Keterlibatan sektor swasta dapat memperkuat penanganan pandemi Covid-19. Sebagai contoh, sektor swasta dapat memberikan dukungan dalam hal peningkatan kapasitas tes Covid-19, produksi alat pelindung diri, serta memberikan bantuan dana dan dukungan sosial kepada masyarakat terdampak.

Penerapan Model Collaborative Governance dalam menanggulangi Covid-19 di Indonesia tidak terlepas dari beberapa tantangan yang dihadapi. Pertama, masih kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Kedua, masih rendahnya kualitas data dan informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan strategis. Ketiga, masih kurangnya akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti peralatan medis, obat-obatan, dan lain sebagainya. Keempat, adanya kebijakan yang belum dilakukan secara konsisten dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat menimbulkan kesenjangan antar daerah. Terakhir, adanya pandangan yang berbeda-beda terkait kebijakan yang harus diambil dalam menangani pandemi Covid-19, yang dapat memicu konflik di masyarakat (Bonso & Irwan, 2021).

Upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, perlu pula peningkatan kualitas data dan informasi serta peningkatan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Konsistensi dan keseragaman kebijakan antar daerah juga perlu ditingkatkan, serta perlu dilakukan upaya untuk menjaga keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan kebijakan. Dalam menjalankan model Collaborative Governance, perlu juga memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan sehingga tercipta solusi yang optimal dalam menangani pandemi Covid-19.

Model collaborative governance terbukti sangat efektif dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia dan memberikan contoh yang baik bagi penanganan krisis di masa depan. Penerapan model collaborative governance membantu meningkatkan koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dan mengimplementasikan kebijakan penanggulangan Covid-19. Hal ini juga membantu meminimalkan tumpang tindih kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengatasi pandemi (Aldini, Kusumawan, & Santoso, 2022).

Penerapan model collaborative governance ini dapat diadopsi pada berbagai masalah sosial dan lingkungan di masa depan. Karena kolaborasi dan partisipasi stakeholder menjadi faktor kunci dalam keberhasilan model ini, maka masalah yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan masyarakat harus diatasi dengan model ini. Contoh masalah lain yang dapat diatasi dengan model ini adalah penanggulangan bencana alam, pencegahan kebakaran hutan, pengelolaan air bersih, dan masih banyak lagi.

Implikasi dari penerapan model collaborative governance dalam menangani masalah sosial dan lingkungan di masa depan adalah terciptanya kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Novita, 2018). Dalam model collaborative governance, keputusan diambil bersama antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan melibatkan berbagai pihak, kebijakan yang dihasilkan akan lebih beragam dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Selain itu, model collaborative governance juga dapat meningkatkan kualitas implementasi kebijakan, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien (Arrozaaq, 2016).

Dalam jangka panjang, penerapan model collaborative governance di masa depan dapat membantu mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks dan beragam. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan

## **KESIMPULAN**

Penerapan model collaborative governance dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia dapat memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta, serta partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam upaya penanganan pandemi. Dalam penerapan model collaborative governance, diperlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga internasional. Selain itu, juga diperlukan transparansi dalam pengambilan keputusan, distribusi informasi yang akurat dan tepat waktu, serta upaya kolaboratif dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penanganan pandemi. Model collaborative governance dapat menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi pandemi Covid-19, serta memberikan contoh yang baik bagi penanganan krisis di masa depan.

## **BIBLIOGRAFI**

- Ahmad, Jumal. (2018). Desain penelitian analisis isi (Content analysis). *Research Gate*, 5(9), 1–20.
- Aldini, Raden Rizky Helmi, Kusumawan, Udan, & Santoso, Budi. (2022). PENGARUH LITERASI DIGITAL SISWA DAN KETERLIBATAN ORANGTUA TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA KELAS VI DI SEKOLAH DASAR NEGRI BENDA. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 10(2), 409–414.
- Arrozaaq, Dimas Luqito Chusuma. (2016). *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo)*. Universitas Airlangga.
- Bonso, Hamjah, & Irwan, Irwan. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Covid-19. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 1(2), 1–9.

- Destanti, Farahdinta, Uljanatunnisa, Uljanatunnisa, & Handayani, Lusia. (2021). Analisis The Whalen Seven Steps Strategic Divisi Komunikasi dan Marketing Jakarta Smart City pada Aplikasi Jakarta Kini. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(2), 84–93.
- Fanani, Abdul Fatah, & Ibrahim, Supardi. (2018). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEMANDIRIAN DESA: Studi pada Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 1–18.
- Gunawan, Rain, & Toni, Ahmad. (2022). Strategi Komunikasi Publik Kemenkes RI Dalam Membangun Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Untuk Vaksinasi Covid-19 Melalui Model SOSTAC. *Jurnal Komunikasi*, 16(1), 52–73.
- Hardi, Warsono. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Joyosemito, Ibnu Susanto, & Nasir, Narila Mutia. (2021). Gelombang kedua pandemi menuju endemi covid-19: Analisis kebijakan vaksinasi dan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Sains Teknologi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 55–66.
- Khasanah, Rahma Putri, & Purwaningsih, Titin. (2021). Analisis Collaborative Governance Dalam Implementasi Kebijakan Psbb Pada Penanganan Pandemi Covid-19 Di Dki Jakarta Tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(3), 155–169.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Marfu'ah, Marfu'ah. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 Di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan*. Universitas Islam Riau.
- Novita, Asti Amelia. (2018). Collaborative Governance dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1), 27–35.
- Riskiyono, Joko. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 159–176.
- Rusli, Muhammad. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
- Supriatna, Eman. (2020). Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 555–564.
- Wahidah, Idah, Athallah, Raihan, Hartono, Nur Fitria Salsabila, Rafqie, M. Choerul Adlie, & Septiadi, Muhammad Andi. (2020). Pandemi COVID-19: Analisis perencanaan pemerintah dan masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 11(3), 179–188.
- Yusuf, Muhammad, Agustang, Andi, Idkhan, Andi Muhammad, & Rifdan, Rifdan. (2021). Transformasi Lembaga Koperasi Di Era Industri 4.0. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4).



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**